

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Program Hibah Bina Desa atau lebih dikenal dengan kata lain PHBD, adalah salah satu program berbasis *collaborative governance* yang melibatkan tiga aktor yaitu pemerintah Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, swasta Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (BEM FISIPOL UMY), dan Masyarakat Kadisoro yang bertujuan dalam melaksanakan program tersebut, program ini di rancang oleh kemenristek Dikti agar Universitas terutama mahasiswa dapat mengimplemantasikan Tridarma Perguruan Tinggi melalui bentuk sebuah pemberdayaan masyarakat program ini menjadi sebuah trobosan yang dapat menjadi sebuah kesempatan mahasiswa untuk belajar kreatif, disiplin, empatik, ulet dan berkarakter positif.

Dalam sebuah kontek pemerintah Program Hibah Bina Desa sudah di laksanakan sejak tahun 2008 sebagai program tahunan yang diadakan oleh Dikti. Dimana pada panduan program tersebut juga didukung oleh landasan – landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (3).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Tujuan dari lahirnya Program Hibah Bina Desa adalah untuk mengarahkan mahasiswa-mahasiswa mampu bersaing dalam pengembangan penelitian, serta dapat berfikir kreatif, inovatif, mampu terjun langsung di masyarakat dan lingkungan sekitar, program ini juga memiliki sasaran untuk dikembangkan dalam bidang pendidikan, pariwisata, serta ekonomi kreatif. Kompetisi yang diadakan oleh dikti ini juga selalu memiliki daya saing yang cukup banyak karena bersekala nasional program hibah yang dilaksanakan pada tahun 2017 tersebut diikuti oleh 4 ribu mahasiswa yang tergabung dalam berbagai kelompok organisasi, yang terpilih hingga akhir program hanya akan di ambil 75 kelompok yang akan mengembangkan program di seluruh Indonesia.

Universitas yang lolos dalam program ini yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dari 20 peserta yang mengajukan terpilih proposal dari organisasi BEM FISIPOL UMY bekerjasama dengan Kadisoro melalui program pemberdayaan yaitu *“Pengembangan Pembudidayaan Ikan Hias melalui Kelompok Ikan Hias Buana Mina dan Pemberdayaan Forum Keakraban Remaja Padukuhan Kadisoro”* satu – satunya program yang lolos kontingen UMY ini bekerjasama dengan dinas terkait juga yaitu dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul yang di dukung penuh sehingga dapat menjadikan program ini tergolong berhasil. Namun dalam melaksanakan program tersebut juga mendapati kendala sebagai berikut yaitu: karang taruna yang belum tau samasekli dalam pembudidayaan ikan, serta modal, dan juga pemasaran.

Dengan adanya kendala tersebut membuat keberlanjutan program tersebut menjadi terhambat dan perlu dilakukan monitoring hingga masyarakat Kadisoro menjadi lebih mandiri. Adanya *collaborative governance* sangat di perlukan *collaborative governance* adalah serangkaian pengaturan yang melibatkan satu atau lebih lembaga publik *stakeholder bon-stake* dalam pembuatan dan pelaksanaan program secara formal yang bersifat konsus, dan dileberatif yang tujuannya untuk mengimplementasikan atau mengatur program publik yang di makasud *stakeholder* dan *nonstate* dalam penelitian ini yaitu pihak swasta BEM FISIPOL UMY dan masyarakat Kadisoro. Dengan adanya *collaborative governance* Kadisoro akan lebih mudah dalam mengembangkan pelaku pembudidya ikan untuk mengangkat sebuah nilai ekonomi kreatif. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian terkait *collaborative governance* dalam Program Hibah Bina Desa tersebut.

Alasan peneliti mengambil penelitian Prgram Hibah Bina Desa BEM FISIPOL UMY, karena program ini memiliki keunggulan dalam pelaksanaan program, termasuk program yang sukses di wilayah DIY-JATENG dan juga bisa di sebut sebagai desa pilot projek dapat kita lihat melalui : Web PHBD 2017, dalam sumber tersebut terdapat file rancangan Monitoring Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada kolom nomor 13 diisi oleh region DIY-Jateng ditandai warna merah, melalui sumber tersebut program ini menjadi sebuah Program terbaik 10 besar percontohan Nasional.

Selain mengapa peneliti memeilih program Hibah Bina Desa, melalui Sumber: Web Bantul, mengatakan bahwa Budidaya ikan hias sangat menjajikan,

kelompok Buana Mina Kadisoro raih juara III Nasional, ukap Er Johan selaku ketua Buana Mina Kadisoro pada tahun (2009: berita Bantul).

Selain itu Kadisoro juga memiliki sebuah organisasi karang taruna yaitu Forum Kearaban Remaja Kadisoro (FKR), bertujuan untuk sarana komunikasi juga sebagai sarana belajar berorganisasi, namun peran penting karang taruna di Kadisoro sangat di butuhkan karena mayoritas kegiatan yang dilakukan di Kadisoro di laksanakan oleh tim pemuda-pemudi. Kepercayaan warga Kadisoro terhadap pemuda sangat besar.

Maka bagaian terpenting yang dapat peneliti ambil dari hasil penemuan di lapangan bahwa memang potensi Kadisoro ini menjadi sebuah setra ikan hias terbaik yang ada di Kabupaten Bantul, pada tahun 2009 kadisoro pernah merahi peringkat 3 terbaik se Indonesia mewakili DIY dalam melakukan kompetisi Adi Bakti Mina Bahari dan menjadi banyak menarik perhatian masyarakat serta khususnya pemerintah di Kabupaten Bantul untuk ikut serta bangga apa yang sudah di raih oleh Kadisoro, karena mengapa ikan hias? usaha ikan ini layak untuk peningkatan ekonomi rumah tangga serta dapat menjadi sarana hiasa rumah juga dapat menjadi penghilang stres sesuai yang di katakan bapak Ir Sugeng Sudaruno yang dikemukakan di berita web Kabupaten Bantul, dan potensi tersebut jarang dimiliki oleh masyarakat lainnya.

Secara teoritis penelitian yang pernah dilakukan dalam sebuah program pemberdayaan masyarakat yaitu program Pemberdayaan Masyarakat melalui pengelolaan sampah (Studi Kasus Bank Sampah Pelita Harapan, Kelurahan

Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Makasar yang di tulis melalui Jurnal (Muh. Saleh Jastam:2015) bahwa program pemerintah yang sering di bahas terkait untuk peningkatan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat yaitu sering kali bank sampah yang di teliti, dan hampir tidak ada penelitian yang mengambil studi pemberdayaan Program Hibah Bina Desa Khususnya pemberdayaan masyarakat berbasis budidaya ikan hias yang melibatkan perguruan tinggi Swasta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melalui mahasiswa BEM FISIPOL. Maka penelitian ini memiliki perbedaan yang memang memungkinkan untuk di teliti.

Dilihat dari perbandingan di atas bahwa pemberdayaan masyarakat cukup luas dalam sebuah bidang, program pemberdayaan masyarakat Kadisoro Khususnya Pemuda yang dilakukan oleh BEM FISIPOL UMY, dengan bekerjasama dengan dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul memiliki ketertarikan peneliti untuk menulis, namun yang akan peneliti fokuskan pada penelitian ini agar menjadi fokus yaitu tentang *Collaborative Governance* dalam Program Hibah Bina Desa di Kadisoro , maka dari uraian latar belakang diatas dapat kita tarik dalam rumusan masalah untuk mengetahui Bagaimana *collaborative goverenance* dalam Program Hibah Bina Desa di Kadisoro Tahun 2017.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar blakang masalah di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana penerapan *collaborative governance* dalam pemberdayaan masyarakat Program Hibah Bina Desa di Kadisoro Tahun 2017 ?
2. Bagaimana peran masing-masing *stakeholder* dalam penerapan program hibah bina desa di Kadisoro tahun 2017 ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan penelitian adalah:

1. Mengetahui peran Pemerintah Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, Swasta BEM FISIPOL UMY, Masyarakat Kadisoro serta implementasi program kendala yang dihadapi dalam Program Hibah Bina Desa BEM FISIPOL UMY 2017.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. **Kegunaan teoritis**, adalah sebagai sumbuangan ilmu pengetahuan pemberdayaan masyarakat melalui *collaborative governance* yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan, BEM FISIPOL UMY, dan Masyarakat Kadisoro, melalui Program Hibah Bina Desa BEM FISIPOL UMY.
2. **Kegunaan praktis**, adalah dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, berupa hasil atau laporan penelitian yang dapat digunakan sebagai referensi atau literatur untuk penelitian selanjutnya serta dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah serta masyarakat dalam melakukan pemberdayaan yang baik.

E. LITERATURE REVIEW

Dari hasil penuturan dari dua puluh literature yang relevan maka dapat di kolompokan yaitu yang menjadi tiga tema untuk dapat memberikan perbandingan peneliti bahwa apa yang akan di tulis peneliti memang berbeda, selain itu juga dapat menjadi referensi untuk digunakan peneliti dalam sitem penulisan maupun teknik penelitian yang sudah ada sebelumnya, dari tiga pengelompokan tema yang sudah digunakan peneliti untuk menjadi literature yaitu:

Pertama peneliti mengambil literature dengan tema pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan yang di kelompokkan berjumlah 12 literature, dari literature yang ada konsep pemberdayaan menurut hasyim dkk pemberdayaan diperlukan pengoptimalan peran penting lembaga masyarakat desa, dan juga diperlukan kemitraan, namun akan berbeda dengan yang dikemukakan oleh Agus Purbatin Hadi sebuah konsep pembangunan ekonomi dari masyarakat untuk masyarakat yang mengutamakan nilai soisal. Pada umumnya apa yang sudah ditulis oleh 10 peneliti ini mengarah pada konsep pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, dan juga dapat memberikan program pengelolaan sampah sebagai pemberdayaan masyarakatn berbasis sadar akan kebersihan dan kesehatan.

Kedua yaitu tema yang dikelompokkan oleh penulis ini tidak jauh berbeda dengan tema di atas, namun kali ini akan berbicara permasalahan tentang ekonomi masyarkat, yang akan lebih sepesifik membicarakan program berbasis ekonomi, pada tema ini penulis memberikan 2 literatur untuk dapat menjadi sebuah

perbandingan, pertama yang ditulis oleh Uly dkk menulis bahwa untuk mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat menggunakan program pendirian koperasi simpan pinjam, penulis memberikan ilustrasi bahwa koperasi dapat memberikan modal bagi masyarakat untuk mendirikan usahanya, selanjutnya yang telah dikemukakan oleh Herry dkk bahwa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dapat melalui desa wisata studi kasus di desa wisata nglanggeran bahwa masyarakat dengan pengelolaan desa wisata dapat menjadikan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mencari dan meningkatkan lading ekonomi masyarakat Desa.

Ketiga pada tema ini adalah kolaborasi / *collaborative governance* literatur dengan tema kolaborasi menulis bahwa kolaborasi adalah kerjasama peran tiga aktor yang terdiri dari swasta, pemerintah, dan masyarakat menjalin kerjasama melalui program atau gagasan yang memunculkan sebuah permasalahan yang ada di wilayah tertentu, pada tema yang ditulis oleh Zaenuri menuliskan tata kelola bencana yang ada di Yogyakarta khususnya pada kawasan gunung merapi untuk dapat memberikan dampak hasil dari kesiap siagaan samapi dengan penanganan memerlukan perumusan dan tindakan melalui tiga aktor yang terlibat, dan lain dengan yang di tulis oleh Umi Fitriana pada penulisan ini mengambil topic tentang program yang sudah dijalankan oleh pemerintah melalui program *one village one product* OVOP dijalankan di Kabupaten Bantul memberika ilustrasi bahwa program ini dapat dikatakan melibatkan pemerintah bantul sebagi ketua program, dan BNI sebagi sarana permodalan atau *stakeholder* dan masyarakat sebagai sasaran objek utama program ini.

Tabel 1
Literature Review

Tema Pemberdayaan Masyarakat			
No	Judul	Peneliti	Review
1	Kemitraan Lembaga Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Studi Kasus di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Bantul	Hasyemi Rafsanjani, Bambang Supriyanto, dan Suwondo. Tahun 2013	Untuk melakukan suatu pemberdayaan di desa, diperlukan pengoptimalan peran dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Penelitian ini juga menemukan adanya kemitraan button up antara LPMD dan pemerintah Desa
2	OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI SINERGI PROGRAM PUAP DENGAN DESA MANDIRI PANGAN	Valeriana Darwis dan I Wayan Rusastra Tahun 2016	Program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di pedesaan pada prinsipnya memiliki banyak persamaan. Hal ini terlihat pada program PUAP dan Demapan
3	Pemberdayaan Masyarakat	Eko Sutoro	Konsep pemberdayaan (masyarakat desa) dapat dipahami juga dengan dua cara pandang., pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat.

4	Partisipasi Masyarakat dalam Program Bank Sampah	Ida Bagus Putu Purbadharmaja, tahun 2016	Penelitian ini diawali dengan kasus banyaknya timbunan sampah di Denpasar, maka penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui indicator partisipasi, masyarakat, sosial, serta dampak ekonomi melalui program bank sampah
5	Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan Pembangunan	Agus Purbathin Hadi	Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "people centred, participatory, empowering, and sustainable"
6	Model Pemberdayaan Masyarakat	Kesi Widjajanti	ada dua pola cara yang mengarah pada peningkatan keberdayaan masyarakat, dimana (1) pola yang terdiri dari dua tahapan untuk keberdayaan, dan (2) pola yang menunjukkan bahwa untuk meningkatkan keberdayaan diperlukan tiga

			tahapan proses aktivitas.
7	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah (Studi Kasus di Bank Sampah Pelita Harapan, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Makasar	Muh. Saleh Jastam Tahun 2015	Penelitian mengarah dari kasus krisis ekologi dan menangkat tema pemberdayaan masyarakat yang berbasis Bank Sampah.
8	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasi Terhadap Ketahanan Sosial Budaya wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran bali	Edi Martono, Anak Agung Itri Andiyani, Muhammad	Penelitian ini mengarah pada proses pemberdayaan pengembangan desa wisata yang dilakukan untuk mengetahui apa permasalahan dalam mempertahankan hubungan sosial dan budaya.
9	Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa menuju Pemberdayaan Masyarakat	Sakinah Nadir, tahun 2013	Dalam penelitian ini membicarakan tentang otonomi daerah untuk pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang di buat oleh pemerintah.
10	Pengelolaan alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa dekat kulon Lamongan	Faizatul Karimah, Choirul Saleh, Ike Wanusmawati	Peneliti ini lebih megarah pada dana desa dimana dana tersebut dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat.
11	Pemberdayaan Masyarakat melalui Community Development Program Posdaya (pos pemberdayaan keluarga)PT. Holcim Tbk Pabrik cilacap	Agus Triyono, Tahun 2014	Program ini dilakukan oleh swasta yaitu PT Holcim Indonesia, dalam kepedulian terhadap

			masyarakat dan ekosistem alam, jadi peneliti ini focus pada program pemberdayaan Kluwarga.
12	Pemberdayaan masyarakat miskin, melalui proses pendidikan nonformil, upaya meningkatkan kesejahteraan sosial kabupaten Halmahera Barat	Safri Mirsdji, Sumarno, Tahun 2004	Penelitian ini mengangkat tentang isu kemiskinan dimana masyarakat yang tidak mampu ini di berdayakan melalui lembaga pendidikan nonformil yang dilakukan oleh Ism di kabupaten Halmahera.
Peningkatan Ekonomi Masyarakat			
13	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)	Uly Hikmah Andini, Mochamad Saleh Soeaidy, Ainul Hayat	Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah pelatihan/pendidikan kepada masyarakat, mendirikan koperasi simpan pinjam serta membangun sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat. Faktor pendukung yang ada meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah, globalisasi dan kemajuan teknologi.
14	Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanngeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal	Hary Hermawan, tahun 2016	Kasus yang diangkat yaitu pemberdayaan

			masyarakat melalui desa wisata nglanggaraan di gunungkidul posisi penelitian ini terfokus pada pemberdayaan masyarakat dalam program pengembangan desa wisata.
<i>Kolaborasi / Collaborative Governance</i>			
15	Tata Kelola Bencana Pariwisata-Bencana Berbasis <i>Collaborative Governance</i>	Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si. 2018	Buku ini menuliskan bagaimana konsep, analisis, dan permodelan yang di terapkan selama ini dalam tata kelola bencana, bagaimna peran asyarakat dalam kontribusinya, bagaimana pemerintah, dan juga bagaimana pihak swasta dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada di kawasan merapi kaliurang.
16	Collaborative Governance Program One Village One Product (OVOP) di Kabupaten Bantul	Umi Fitriana Lestari tahun 2017	Skripsi ini menuliskan tentang bagimna kolaborasi program OVOP ini dapat berjalan dengan baik, dan memberikan sebuah perbedaan antara kabupaten lain
17	PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP: KOLABORASI PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM PENGELOLAAN ASSET PUBLIK DI KOTA MAKASSAR	Abdul Mahsyar, tahun 2015	Penelitian ini memposisikan pada kolaborasi pemerintah dengan swasta yang bertujuan untuk

			memberikan teori kolaborasi dalam pengelolaan asset public terutama di kota makasar.
18	Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Surabaya (Studi kasus Program CSR Melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Kampung Lawas Maspati Kelurahan Bubutan Kecamatan Bubutan Kota Surabaya	Devita Rahmasari Prasetyo, Tahun 2016	Secara umum penelitian ini memposisi dalam implemntasi program CSR yang dilakukan oleh pelindo III Surabaya yang memberikan pendampingannya untuk memberdayakan masyarakat kampung lawas maspati.
19	Collaborative Governance dalam Program Kampung UKM Digital Kabuoaten Bantul (Studi Kasus Setra Kerajinan Batik Kayu Krebet Kabupaten Bantul)	Purbowati, Indri Tahun 2016	Kolaborasi kampung UKM ini menjadi salah satu binaan PT Telkom yang berkerjasama dengan dinas Prindakop Kabupaten Bantul, kolaborasi ini memberikan memiliki tujuan untuk peningkatan pasar yang ada di Krebet.
20	Collaborative Governance Model In The Village Fund Mangement At Banggai Regency (Model Governans Kejasama dalam Pengurusan dana Kampung di Kabupaten Banggai)	Rahmawati Halim Tahun 2018	Model kolaborasi yang dilakukan untuk pengelolaan dana desa.

Dari beberpa penelitian yang dipaparan dari literature di atas pada dasarnya semua semua berfokus pada pemberdayaan pegawai, pemberdayaan masyarakat

dengan program bank sampah, dan juga kolaborasi yang berbasis bencana serata program ovop, blum ada yang meneliti tentang Program Hibah Bina Desa, yang di laksanakan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta makan penelitian ini menjadi penelitian yang baru yang datang dari pemikiran peneliti sendiri.

Berdasarkan penelitian diatas, penelitian ini menarik dan berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang di kemukakan program program yang berbeda dan meneliti tentang bencana, ukm, maupun birokrasi. Oleh karena itu belum terdapat menelitian yang terkait tentang *Collaborative Governance* dalam Program Hibah Bina Desa di Kadisoro Tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa peneliti akan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan tentang kerjasama tiga aktor yang terlibat dalam program ini.

F. Kerangka Teori

1. Stakeholder

Definisi stakeholder menurut Freeman dan McVea (2001) adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. *Stakeholder* adalah kelompok yang memiliki hubungan baik dengan kelompok lainya yang memiliki baik itu untuk mempengaruhi dan terpengaruh. Munculnya teori *stakeholders* sebagai paradigma dominan semakin menguatkan konsep bahwa perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham melainkan juga terhadap para pemangku kepentingan atau *stakeholder* (Maulida dan Adam, 2012).

2. *Collaborative Governanace*

Menurut Ansell dan Gash dalam Sudarmo (2011:101) kolaborasi/*collaborative* secara umum bisa dibedakan ke dalam dua pengertian yaitu kolaborasi dalam arti proses, dan kolaborasi/*collaborative* dalam arti normatif. ***Collaborative dalam arti sebuah proses*** dalam serangkaian kegiatan atau digunakan untuk mengatur atau mengelola sebuah kegiatan. yang melibatkan lembaga Pmerintahan, non Pmerintahan, masyarakat, termasuk komunitas disekitarnya. Keterlibatan tersebut disesuaikan dengan porsi kegiatan atau tupoksi dari keterlibatan yang ada didalamnya. ***Collaborative dalam arti normatif*** ini berkaitan dengan tujuan dan aspirasi pemerintah dalam melakukan komunikasi dengan para mitranya. *collaborative governance* dalam hal ini tidak hanya berupa institusi formal tetapi juga bisa dengan cara berperilaku dan bersikap, institusi non pemerintah yang lebih besar dalam melibatkan diri ke dalam manajemen publik pada suatu periode.

Definisi *collaborative governance* menurut Ansell and Gash (2007:554) menyatakan, *collaborative governance* yaitu gabungan dari beberapa peraturan dimana satu atau lebih dari lembaga publik yang mengikuti sertakan dirinya secara langsung *stakeholder nonstate* dalam pembuatan kebijakan public secara formal berorientasi pada *consensus* dan *deliberatif* yang mempunyai tujuan untuk menciptakan dalam mengimplementasikan kebijakan publik yang telah diatur dalam program atau asset. Dalam kontek ini menjelaskan bagaimana upaya-upaya

pemerintahan dan *stakeholder nonstate* berkolaborasi untuk memecahkan permasalahan di masyarakat atau publik.

Menurut Richard dan Smith dalam Syafri (2012:196) konsep *governance* memperhitungkan seluruh aktor dan area kebijakan yang berada di luar “pemerintahan/eksekutif inti” yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Menurut Ansell dan Gash (2007) *collaborative governance* adalah cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung *stakeholder* di luar negara, berorientasi pada konsensus, dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang memiliki tujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan dan program publik.

Sedangkan menurut Sudarno (2011:102-104) pada umumnya, *collaborative* dipandang sebagai perselisihan yang bisa disebabkan karena banyaknya kebijakan, dan respon dari organisasi terhadap perubahan atau pergeseran dalam lingkungan kebijakan yang menjadi isu-isu semakin meluas karena publik dari batasan norma-norma, kapasitas pemerintah pusat umumnya semakin meningkat serata pada diluar pemerintah daerah atau kota serta inisiatif spontan ditunjukkan untuk masyarakat luas.

Menurut Wanna dalam (Zaenuri,2016: 15) menyatakan bahwa kolaborasi melibatkan beberapa dimensi sebagai berikut yaitu :*Pertama* kolaborasi dapat melibatkan peran pengawasan, pemeriksaan, menarik bersama-sama dan koordinasi pusat, *kedua* kolaborasi bisa melibatkan kerjasama untuk membangun kesamaan,meningkatkan konsistensi dan

menyelaraskan kegiatan antara actor, *ketiga* kolaborasi dapat menjadi proses organisasi, yang melibatkan kesiapan untuk berkompromi membuat *trade-off*, *keempat* kolaborasi dapat melibatkan kekuasaan dan pemaksaan, kemampuan untuk memaksa hasil atau memaksakan preferensi sendiri, *kelima* kolaborasi dapat melibatkan komitmen dan niat masa depan, kemungkinan berperilaku, perencanaan atau persiapan untuk menyelaraskan kegiatan. Akhirnya, kolaborasi dapat menumbuhkan komitmen pribadi untuk kegiatan, tujuan organisasi atau tujuan yang lebih strategis, pengembangan motivasi internal, keputusan, dan keterlibatan. Dari kelima dimensi tersebut tidak serta merta berjalan konsisten akan tetapi bisa bersifat eksklusif.

Menurut Ansel dan Gash (2007) berpendapat bahwa tolak ukur untuk menilai keberhasilan kolaborasi dalam sebuah program dapat diukur melalui beberapa item yang dijadikan sebagai landasan *collaborative governance* yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Kondisi Awal (*Strating Condition*)

Pada tahap awal dalam relasi antar stakeholder, masing-masing aktor memiliki latar belakang berbeda yang dapat menghasilkan sebuah bentuk hubungan asimetris dalam relasi yang dijalankan. Bentuk ketidakselarasan tersebut antara lain seperti distrust, sikap tidak saling menghormati, antagonisme antaraktor atau pertentangan. Menurut

Ansel dan Gash (2007) dalam (Harmawan, 2016) mengerucutkan pada tiga variabel kondisi awal imbalances between the resources or power of different stakeholder, the incentives between that stakeholders have to collaborate, and the past history of conflict or cooperation among stakeholders (ketidakseimbangan antara sumber-sumber atau kekuatan antar stakeholder yang berbeda, dorongan-dorongan bahwa aktor-aktor harus berkolaborasi dan latar belakang sejarah konflik bekerjasama stakeholder).

b. Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*)

Aspek kepemimpinan menjadi unsur penting dalam pelaksanaan kolaborasi antar pemerintah dengan non-pemerintah. Kepemimpinan merupakan bagian krusial dan memiliki peran secara jelas dalam menetapkan peraturan dasar, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog dan menganalisa keuntungan bersama. Ansel dan Gash (2007) dalam Harmawan (20016) mengidentifikasi tiga komponen kepemimpinan kolaboratif yang efektif, yaitu:

- Manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi
- Pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis
- Memastikan bahwa kolaborasi tersebut diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua aktor.

Kolaborasi yang sukses itu menggunakan mekanisme Multiple Leadership. Lasker dan Weis dalam Harmawan (2016) menemukan

bahwa kepemimpinan yang berkolaboratif harus memiliki ketrampilan-ketrampilan berupa (1) mempromosikan secara luas dan aktif berpartisipasi, (2) memastikan pengaruh dan kontrol secara luas (3) memfasilitasi produktivitas dinamikadinamika kelompok atau aktor, (4) mampu memperluas cakupan proses.

Ketika tidak terdapat relasi yang bersifat simetris antara pemerintah dengan swasta maka harus dimunculkan pemimpin “organik” yang berasal dari stakeholder masyarakat. Ketersediaan pemimpin seperti itu akan sangat bergantung pada keadaan lokal.

c. Desain Institusional (*Institutional Design*)

Ansel dan Gash (2017) dalam Harmawan (2016) mendeskripsikan bahwa desain institusional mengacu pada protokolprotokol dasar dan aturan-aturan dasar untuk berkolaborasi secara kritis yang paling ditekankan adalah legitimasi prosedural dalam proses kolaborasi. Dalam proses kolaborasi yang harus ditekankan adalah pemerintah harus bersifat terbuka dan inklusif. Karena hanya beberapa kelompok yang merasakan bahwa legitimasi untuk berpartisipasi hanya dimiliki oleh beberapa kelompok saja. Proses harus terbuka dan inklusif karena hanya kelompok yang merasa memiliki kesempatan yang sah untuk berpartisipasi dalam mengembangkan komitmen dalam proses yang terjadi. Pemerintah dalam konteks ini

harus bersifat terbuka dan memberikan kesempatan yang luas kepada stakeholder yang terlibat.

Jantung dari proses legitimasi harus berdasarkan pada (1) kesempatan bagi setiap aktor berkomunikasi dengan stakeholder lain tentang hasil-hasil kebijakan, (2) klaim bahwa hasil kebijakan merupakan konsensus oleh seluruh aktor. Ketika terdapat aktor yang sebenarnya terkait dengan isu yang diwacanakan tetapi aktor tersebut tidak memiliki kesesuaian atau tidak memiliki motif yang kuat untuk terlibat maka pemerintah harus mengambil sikap untuk membuat yang eksklusif tanpa harus ada keterlibatan aktor lain secara inklusif. Dalam proses desain institusional tersebut harus memakai orientasi yang bersifat konsensus. Isu desain institusional harus menampilkan urutan waktu yang terstruktur sampai kapan kolaborasi tersebut dijalankan.

d. Proses Kolaborasi (*Collaborative Process*)

Model proses kolaborasi menggambarkan kolaborasi sebagai perkembangan tahapan. Gray dalam Harmawan (2016) mendefinisikan tiga tahapan proses kolaborasi antara lain problem setting (penentuan masalah), direction setting (penentu tujuan), dan implementasi. Dalam kajian-kajian literatur yang sudah dilaksanakan kita berhenti pada bahwa proses kolaborasi terjadi bersifat tidak teratur dan tidak linear. Kolaborasi seringkali dipandang untuk bergantung pada pencapaian hanya mengacu pada tujuan yang ideal seperti komunikasi, kepercayaan, komitmen, saling memahami, dan hasil. Meskipun proses kolaborasi terjadi secara

tidak teratur akan 32 tetapi komunikasi adalah jantung dari kolaborasi sehingga kita memulai analisa dari dialog *Face to Face*.

- Membangun kepercayaan (*rust buildig*)

Adanya kepercayaan antar aktor merupakan poin awal dari proses kolaborasi, beberapa literatur menyatakan proses kolaborasi tidak hanya berkuat pada negosiasi tetapi juga 33 membangun kepercayaan antar aktor. Trust building menjadi satu fase yang digunakan untuk membentuk proses saling memahami antar stakeholder agar terbentuk komitmen untuk menjalankan kolaborasi.

- Komitmen terhadap proses (*Comitment to process*)

Meskipun terminologi komitmen terhadap proses cenderung bervariasi agak luas dalam kajian literasi, namun beberap conoh kasus megungkapkan bahwa tingkatan komitmen terhadap kolaborasi adalah variabel utama dalam menjelaskan sukses atau tidaknya sebuah kolaborasi. Komitmen erat hubungannya pada motivasi yang bersifat orisinil untuk berpartisipasi dalam collaborative governance. Komitmen terhadap proses berarti mengembangkan keyakinan bahwa perundingan dengan itikad baik untuk keuntungan bersama adalah cara terbaik untuk mencapai hasil kebijakan yang diinginkan. Hal ini mengindikasikan bahwa kepercayaan adalah elemen penting dalam kolaborasi. Komitmen bergantung pada kepercayaan akan aktor-aktor lain mau menghormati perspektif dan kepentingan aktor lain. Hal ini juga menjelaskan secara

gamblang seberapa bersih, seberapa adil, dan transparan prosedur. Sebelum berkomitmen pada sebuah proses yang berjalan dengan arah tidak terprediksi, aktor-aktor harus mampu meyakinkan diri 34 mereka bahwa prosedur deliberasi dan negosiasi memiliki integrasi. Rasa kepemilikan dan komitmen dapat memperkuat keterlibatan antar aktor. Collaborative governance dapat membentuk rasa kepemilikan terhadap pengambilan keputusan dari lembaga agensi atau pemerintah kepada stakeholder yang bertindak secara kolektif.

Rasa kepemilikan terhadap proses berimplikasi pada munculnya rasa saling bertanggungjawab terhadap proses. Trust memiliki peranan dalam menjamin bahwa masing-masing aktor memiliki tanggungjawab tersebut. Bentuk-bentuk mandatori dalam kolaborasi dapat dilaksanakan ketika dorongan untuk berpartisipasi antaraktor bersifat lemah, akan tetapi kooperasi yang bersifat mandatori mengindikasikan adanya kelemahan komitmen antaraktor. Tinggi rendahnya sifat ketergantungan antaraktor akan menentukan kesuksesan proses kolaborasi.

- Saling memahami (*Share understanding*)

Dibeberapa poin proses kolaborasi, aktor-aktor harus mengembangkan share understanding (sikap saling memahami terhadap apa yang akan dicapai bersama. Share understanding dalam beberapa literasi disebut sebagai misi bersama, kesamaan niat, kesamaan tujuan, kesamaan visi bersama, ideologi bersama, tujuan-tujuan yang jelas, arah 35 yang strategis dan jelas atau keselarasan

nilai-nilai inti. Share understanding juga dapat berarti kesepakatan dalam mendefinisikan sebuah masalah.

- Hasil sementara (*Intermediate Outcomes*)

Banyak studi kasus memperlihatkan bahwa kolaborasi secara relatif dapat dikatakan konkrit ketika adanya kemungkinan keberhasilan dari kolaborasi. Meskipun hasil sementara ini akan menampilkan output atau keluaran nyata akan tetapi proses outcomes tersebut merupakan esensi untuk membangun momentum yang dapat mengarahkan kolaborasi yang sukses. Dalam proses intermediate outcomes tidak dapat digeneralisir sebagai hasil akhir yang dicapai.

Konsep kolaborasi Ansel and Gash merupakan sebuah konsep untuk menganalisis peran tiga aktor, pemerintah, masyarakat, dan swasta namun pada konsep kali ini memberikan suatu modifikasi terhadap peran yang dilakukan oleh aktor swasta. Swasta yang terlibat merupakan perguruan tinggi swasta yang dapat dikatakan sebagai akademisi merupakan konsep tripel holix (Etzkowitz&Leydesdorff,2000) mengatakan bahwa peran perguruan tinggi merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam melakukan sebuah inovasi-inovasi teknologi.

3. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian pemberdayaan masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat jika kita telah sebenarnya berangkat dari pandangan yang menempatkan manusia sebagai subjek dari dunia sendiri. Pola dasar gerakan pemberdayaan ini mengamanatkan kepada perlunya *power* dan menekankan keberpihakan kepada kelompok yang tidak berdaya (Zubaedi, 2014: 72-23).

Menurut Adi Fahrudin (2012: 67-68) pemberdayaan adalah proses peningkatan kekuatan pribadi, antar pribadi, atau politik sehingga individu-individu, keluarga-keluarga dan komunitas agar mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi-situasi mereka (Gutierrez dalam DuBois & Miley, 2005). Menurut Robbins, Chettarjee, dan Canda (1998, dalam Fahrudin 2012) pemberdayaan menunjukkan proses yang dengan itu individu-individu dan kelompok-kelompok memperoleh kekuatan, akses pada sumber-sumber, dan kontrol atas kehidupan mereka sendiri. Dalam melakukan itu, mereka memperoleh kemampuan untuk mencapai aspirasi-aspirasi dan tujuan pribadi dan kolektif mereka yang tinggi.

b. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Mathews menyatakan bahwa "*prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten*". Karena itu, prinsip akan berlaku umum, dapat diterima secara umum, dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang

beragam. Dengan demikian prinsip dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar, bagi pelaksana kegiatan yang akan dilaksanakan (Mardikanto dan Soebianto, 2015:105).

c. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat. Terkait dengan hal ini, pembangunan apapun pengertiannya yang diberikan terhadapnya, selalu merujuk pada upaya perbaikan, terutama perbaikan pada mutu hidup manusia, baik secara fisik , mental ekonomi maupun sosial–budaya. Tujuan pemberdayaan menurut Mardikanto & Soebianto (2015: 111-112) meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut:

- Perbaikan Pendidikan (*better education*)

Dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang dalam suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada: perbaikan materi, perbaikan metoda, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat.

- Perbaikan Akseptabilitas (*better accessibility*)

Dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aseptabilitasnya, utamanya tentang aseptabilitas dengan sumber informasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan lembaga pemasaran.

- Perbaiki Tindakan (*better action*)

Dengan berbakal perbaikan pendidikan dan perbaikan aseptabilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik.

- Perbaiki kelembagaan (*better institution*)

Dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik.

- Perbaiki Usaha (*better business*)

Perbaikan pendidikan, aseptabilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

- Perbaiki pendapatan (*better income*)

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

- Perbaiki lingkungan (*better environment*)

Perbaikan pendapatan dalam memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

- Perbaiki Kehidupan (*better living*)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

- Perbaiki Masyarakat (*better community*)

Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

- Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Soetomo (2006: 198-200) dalam pendekatan pemberdayaan, yang dilakukan adalah tumbuhnya kapasitas lokal untuk menghasilkan perbaikan yang bersifat mandiri, sukses program tidak diukur dari sudut organisasi penyelenggaraan tetapi pada kesinambungan manfaat program bagi masyarakat baik pada saat maupun terutama setelah program berakhir.

Program yang berhasil menumbuhkan perbaikan dalam jangka panjang adalah program yang mampu mendorong perbaikan berkelanjutan secara mandiri baik dalam hal perbaikan kesejahteraan masyarakat maupun dalam peningkatan kapasitas masyarakat untuk membangun. Dalam hal ini yang dihasilkan adalah berkelanjutan ekonomi dalam bentuk manfaat bagi peningkatan kesejahteraan sosial dalam bentuk kapasitas masyarakat untuk membangun secara mandiri (Soetomo, 2006: 198-200)

d. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Mardikanto & Soebianto (2015: 167-168) menjelaskan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh sebab itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pengertian sehari-hari, strategi sering diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu, yang dilakukan demi tercapainya suatu tujuan atau penerima manfaat yang dikehendaki, oleh karena itu, pengertian strategi sering rancu dengan metode teknik dan taktik.

Tentang hal ini secara konseptual strategi sering dikaitkan dengan beragam pendekatan, seperti:

- Strategi Sebagai Rencana

Sebagai suatu rencana, strategi merupakan pedoman atau acuan yang dijadikan landasan pelaksanaan kegiatan, demi tercapainya tujuan-tujuan yang ditetapkan. Dalam hubungan ini, rumusan strategi senantiasa memperhatikan kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal yang dilakukan oleh pesaingnya.

- Strategi Sebagai Kegiatan

Sebagai suatu kegiatan, strategi merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh setiap individu, organisasi, atau perusahaan untuk memenangkan persaingan, demi tercapainya tujuan yang diharapkan.

- Strategi Sebagai Suatu Instrumen

Sebagai suatu instrumen, strategi merupakan alat yang digunakan oleh semua unsur pemimpin, sebagai pedoman pengendali pelaksanaan kegiatan.

- Strategi Sebagai sistem

Strategi sebagai suatu sistem, strategi merupakan suatu kesatuan rencana dan tindakan-tindakan yang komprehensif dan terpadu, yang diarahkan untuk menghadapi tantangan-tantangan guna mencapai tujuan yang ditetapkan.

- Strategi Pola Pikir

Strategi pola pikir, strategi merupakan suatu tindakan yang dilandasi oleh wawasan yang luas tentang keadaan internal maupun eksternal untuk rentan waktu yang tidak pendek .

Bahwa pengertian apapun yang diberikan, strategi merupakan suatu proses sekaligus produk yang penting yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memenangkan persaingan, demi tercapainya tujuan (Mardikanto dan Soebianto, 2015: 168)

e. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Jim Ife & Frank Tegerico (2008), setidaknya ada enam dimensi pengembangan atau pemberdayaan masyarakat dan kesemuanya berinteraksi satu dengan lainnya dalam bentuk-bentuk yang kompleks. Keenam dimensi tersebut yaitu:

1. Pengembangan sosial
2. Pengembangan ekonomi
3. Pengembangan politik
4. Pengembangan budaya
5. Pengembangan lingkungan
6. Pengembangan personal/sepiritual

Beberapa dimensi lebih fundamental daripada lainnya; misalnya banyak orang (khususnya orang peribumi) akan beranggapan bahwa pengembangan personal/sepiritual merupakan landasan untuk semua pengembangan yang lain. Tetapi untuk tujuan penyusunan model pengembangan masyarakat dan model pemikiran tentang peran masyarakat, keenam dimensi di atas dipertimbangkan sebagai hal yang sangat penting.

4. Program Hibah

a. Program Hibah Kompetensi

Salah satu tujuan utama dalam penyelenggaraan program hibah kompetensi ini adalah untuk mendukung kebijakan pemerintah untuk mengimplementasikan focal point pada setiap perguruan tinggi, tanpa membatasi ruang geraknya baik dalam aspek penelitian maupun penerapan

hasil-hasil penelitiannya melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam hibah kompetensi ini para dosen/peneliti diberikan kebebasan untuk memilih tema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan, walaupun temanya bebas seorang dosen/peneliti harus tetap konsisten dengan bidang ilmu yang diampu di perguruan tingginya. Jumlah dana maksimum yang didapatkan untuk program ini adalah Rp. 100 juta per tahun (Rizky:2015)

PHBD adalah salah satu program dari Dirjen Dikti Menendikbud yang ditawarkan setiap tahun kepada organisasi mahasiswa baik Ikatan Organisasi Mahasiswa Sejenis (IOMS), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) maupun Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) untuk berperan serta dalam memberdayakan masyarakat.

Program ini juga bertujuan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk lebih berperan aktif dalam pembangunan, yaitu pengabdian kepada masyarakat dengan membantu meningkatkan taraf ekonomi dan ilmu pengetahuannya, menumbuhkan empati dan kepedulian mahasiswa pada lingkungan, menerapkan Ipteks dalam tim kerja yang bersifat interdisipliner, dan menanamkan nilai kepribadian, keuletan, etos kerja dan tanggungjawab serta karakter bangsa yang berdasarkan Pancasila.

G. DEFINISI KONSEPTUAL

1. Stakeholder

Peran yang dilakukan oleh setiap perusahaan/organisasi kelompok atau perorangan untuk saling mempengaruhi, dalam menjaga sebuah kepercayaan yang saling terkait.

2. *Collaborative governanace*

Collaborative governanace merupakan sebuah kerjasama yang melibatkan bebrapa pihak yang terkait dari lembaga pemerintah, non pemerintah, maupun masyarakat. Antara lain kerjasama yang dibangun berdasarkan sebuah rasa kepercayaan, tanggungjawab, serta dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsi yang dimiliki, dan bisa dilakukan secara berkesinambungan.

3. Pemberdayaan masyarakat

Upaya yang dilakukan untuk memberikan kekuatan dan kemandirian kepada seseorang atau sekelompok dalam lapisan masyarakat, yang mengalami sebuah kemiskinan atau bisa dikatakan ketertinggalan untuk melakukan kehidupannya sehari-hari.

4. Program Hibah

Memiliki tujuan untuk mengimplemntasikan tridarma perguruan tinggi, untuk mewujudkan sebuah pertanggungjawaban pemerintah

dalam melakukan penyaluran dana Negara yang akan kembali untuk masyarakat untuk sebuah pengembangan.

H. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi Operasional yang digunakan untuk melihat *collaborative governance* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Variabel dan Indikator Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator
1	Kondisi Awal (<i>Starting Condition</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Perbedaan relasi b. Hubungan yang asimetris c. Ketidak selarasan sifat
2	Kepemimpinan Fasilitatif (<i>Fasilitative Leadership</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan karakter kepemimpinan mengacu pada regulasi b. Dialog untuk menganalisis sebuah keuntungan
3	Desain Institusional (<i>Institucional Desagin</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang untuk mengkritisi legitimasi b. legitimasi dalam membangun sebuah kelembagaan c. Keterbukaan atau inklusif antar aktor
4	<i>Collaborative Process</i> (Proses Kolaborasi)	<ul style="list-style-type: none"> a. Agenda setting program b. Proses komunikasi c. Komiten terhadap proses d. Terwujudnya outcome

I. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini memiliki peran sangat penting dalam melakukan suatu penelitian, sebab berhasil tidaknya suatu penelitian ditentukan dari metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Metode penelitian adalah salah satu

cara peneliti untuk mendapatkan hasil penelitian. Pada umumnya metode penelitian dibagi menjadi dua, metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian merupakan pengetahuan tentang berbagai cara yaitu dari kerja untuk memahami objek-obyek yang menjadi sarana dari pada ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif ditentukan pada penempatan (*generation of theory*) dan menekankan pendekatan induktif untuk hubungan antara teori penelitian, yang dikonstruksikan sebagai suatu strategi penelitian yang biasanya menekankan kata-kata dari pada kualifikasi dalam mengumpulkan analisis data, yang oleh karena itu penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses penelitian atau penyelidikan dalam memenuhi permasalahan sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistic/lengkap yang dibentuk oleh kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah (Moleong, 2009). Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif, penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena yang terjadi dimasyarakat (Notoatmojo, 2012).

Penelitian *Collaborative Governance* Dalam Program Hibah Bina Desa ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena untuk mengangkat fakta, fenomena dan keadaan yang ada, sehingga penelitian ini bisa melihat situasi sosial lebih mendalam, dalam penelitian menggunakan

jenis penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali informasi mendalam terkait *Collaborative Governance* Dalam Program Hibah Bina Desa di Kadisoro tahun 2017.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Kadisoro Gilangharjo Pandak Bantul yang akan disasarkan oleh ketua tim penerima hibah, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang akan di sasarkan kepada kepala bidang perikanan, Kantor BEM FISIPOL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang akan disasarkan kepada tim PHBD tahun 2017.

3. Unit Analisis Data

Unit analisis data adalah satuan yang diteliti berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian (Hamidi, 2005:7) unit analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3
Unit analisis Data

No	Intansi	Jumlah	Narasumber
Masyarakat			
1	Kepala Dukuh	1	Basuki Pantoro
2	Buana Mina	1	Er Johan
3	Karang Taruna	1	Setyo Nugroho
Pemerintah Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul			
5	Penyuluh dinas	1	Stepanus Kriswanto
6	Kabid Dinas pertanian pangan, kelautan dan perikanan Kab Bantul	1	Istiyani
Swasta			
7	TIM PHBD BEM FIDIPOL UMY	1	Ammar Hidayatulloh

4. Jenis Data

a. Data primer

Data primer adalah suatu objek adatu dokumentasi original material menantah dari perilaku yang disebut "*frist-hand information*" data yang dikumpulkan dari situasi actual ketika peristiwa terjadi dinamakan data primer. Sumber data yang diperoleh secara langsung sebagai hasil pengumpulan penelitian yang berupa kata atau frase yang diperoleh melalui wawancara atau pengamatan langsung. Dalam penelitian ini mengupulkan data premier dengan cara menemui langsung kepada masyarakat Desa Kadisoro Penerima Program, seta Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kab Bantul, seta tim PHBD. studi kasus yang saya gunakan adalah tentang pemberdayaan masyarakat desa kadisoro dengan cara *Collaborative Governance* agar hasil informasi penelitian dapat digali lebih jauh.

Tabel 4
Data Primer

No	Data Primer	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Implementasi PHBD	<ul style="list-style-type: none"> • Amar Hidayatullah tim PHBD 	Wawancara
2	Peran dinas dalam kerjasama program	<ul style="list-style-type: none"> • KABID Perikanan kabupaten Bantul • Stepanus Kriswanto pendamping dan penyuluh 	Wawancara
3	Sebelum ada program dan dampak sesudah ada program	<ul style="list-style-type: none"> • Basuki Pantara Dukuh • Setyo Nugroho Skretaris FKR 	Wawancara

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung diberikan kepada peneliti atau pengumpul data (Sugiono:2008:402). Data sekunder merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku literatur dan bacaan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, tentang pemerintah yang akan menemukan sebuah gambaran umum untuk mempermudah penulis melakukan penelitian.

Tabel 5
Data Sekunder

No	Data Sekunder	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Perencanaan Program	TIM PHBD	Dokumentasi
2	IMPLEMENTASI	TIMPHBD	Dokumentasi
3	Kemitraan	TIM PHBD	Dokumentasi
4	Peserta sasaran	Tim PHBD	Dokumentasi
5	Laporan Monev	TIM PHBD	Dokumentasi
6	Laporan Program	TIM PHBD	Dokumentasi
7	Tindak Lanjut	TIM PHBD	Dokumentasi
8	Dampak Program	TIM PHBD	Dokumentasi

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi berarti pengamatan setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Secara lebih sempit, observasi adalah pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi langsung di lapangan untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh masyarakat kadisoro untuk memperbaiki kondisi desa melalui Program Hibah Biana Desa.

b. Wawancara (*interview*)

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. (Bungin, 2011: 111). Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui secara mendalam mengenai cara yang digunakan oleh Tim PHBD untuk memberdayakan masyarakat Desa Kadisoro melalui *Collaborative Governance*. Berikut adalah yang akan peneliti wawancara untuk mengumpulkan data primer dan sekunder.

c. Studi Dokumentasi

Menurut Hasan (2002: 87) studi dokumen adalah teknik pengumpulan data melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan dokumen-dokumen seperti foto, tabel, evaluasi program pemberdayaan yang sudah ada, dll.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief dalam bukunya terampil mengolah data kualitatif NVIV membagi teknik analisis menjadi tiga yakni

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi muali disusun sehingga memberi kemungkinan menarik kesimpulan

c. Penarik kesimpulan

Penarik kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil sebuah tindakan dan mengutarakannya.

7. Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan gambaran yang jelas tentang isi dari penelitian ini, maka disusunlah sistematika penelitian yang akan

menjelaskan perihal apa saja yang akan dibahas dalam setiap bab. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I – PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan alasan pengambilan judul penelitian ini, informasi yang tercantum dalam bab ini yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan pada bab pertama ini merupakan dasar untuk melanjutkan ke pembahasan ke bab selanjutnya.

BAB II - GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab dua akan membahas tentang profil tentang Kadisoro pada umumnya dan pada khususnya informasi tersebut meliputi masyarakat, & serta struktur organisasi kepemudaan yang diberdayakan.

BAB III - SAJIAN DATA DAN ANALISIS

Dalam bab tiga ini akan dilakukan pemaparan tentang *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM HIBAH BINA DESA DI KADISORO TAHUN 2017* yang terdiri dari beberapa hasil penelitian berupa observasi langsung, wawancara perorangan, dokumentasi dan studi pustaka.

BAB IV - PENUTUP

Bab terakhir dari penelitian ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, selain itu peneliti juga menuliskan saran yang ditujukan bagi beberapa *stakeholder* yang terkait.